



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan periode Triwulan IV Tahun 2023 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Ukon Ahmad Furkon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3.1	KELOMPOK KERJA TATA PERIZINAN	4
1.3.2	KELOMPOK KERJA HARMONISASI DAN PEMANTAUAN PERIZINAN	
1.3.3	KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN NELAYAN	
1.3.4	KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN NELAYAN	
1.3.5	SUBKOORDINATOR BIDANG TATA USAHA	7
1.3.6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	11
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	9
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	10
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	10
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
3.2.1	PENGELOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	15
IKU 1	PERSENTASE KELOMPOK USAHA BERSAMA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	
IKU 2	PERSENTASE NELAYAN YANG MEMILIKI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN (KUSUKA) BIDANG PENANGKAPAN IKAN	
IKU 3	KAMPUNG NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN DAN DIFASILITASI PENATAANNYA MELALUI PROGRAM KAMPUNG NELAYAN MAJU (KALAJU)	
IKU 4	NELAYAN YANG DIFASILITASI KEPEMILIKAN TANAHNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI TANAH NELAYAN	
IKU 5	PERSENTASE NELAYAN YANG TERLINDUNGI	
3.2.2	PENGELOLAAN PERIZINAN SESUAI KETENTUAN	16
IKU 6	ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN	

	IKU 7	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN SERTA SERTIFIKATB KUOTA PENANGKAPAN IKAN YANG DITERBITKAN	
	IKU 8	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENAGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI	
	IKU 9	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 10	PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 11	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENAGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 12	PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR	
3.2.3		KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN	
	IKU 13	KELOMPOK NELAYAN YANG TERBENTUK MENJADI KELEMBAGAAN KORPORASI NELAYAN	
3.2.4		TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIT. PDK	19
	IKU 14	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	

3.2.5		TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DILINGKUNGAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	21
	IKU 15	IP ASN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 16	NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 17	PERSENTASE UNIT DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR	
	IKU 18	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 19	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 20	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 21	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
3.3		AKUNTABILITAS KEUANGAN	

PENUTUP

DATA DUKUNG

DAFTAR TABEL

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2022
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2022
TABEL 3	RENCANA AKSI IKU TAHUN 2022
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (SK) DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN TW III TAHUN 2022
TABEL 5	PERSENTASE KENELAYANAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING
TABEL 6	PERSENTASE PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP SESUAI KETENTUAN
TABEL 7	PERBANDINGAN PERSANTESE PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN TANGKAP SESUAI KETENTUAN
TABEL 8	PENERIMAAN PNBP SEKTOR SDA LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP
TABEL 9	PERBANDINGAN CAPAIAN PENERIMAAN PNBP SEKTOR SDA LINGKUP DITJEN PERIKANAN TANGKAP
TABEL 10	PENGELOLAAN SARANA PEMUNGUTAN PNBP PASCA PRODUKSI
TABEL 11	KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN
TABEL 12	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 13	NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 14	INDEKS PROFESIONAL (IP) ASN LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 15	PERSENTASE UNIT DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
TABEL 16	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE MP
TABEL 17	PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 18	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN
TABEL 19	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 20	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 21	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2022

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. PDK
- GAMBAR 2 DASHBOARD KINERJAKU CAPAIAN KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
- GAMBAR 3 DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN III DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2022
-
-

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 138.446.149.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2023 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2023 Tanggal 30 November 2022. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023 pasca pembentukan tim kerja, memiliki 5 Sasaran Kerja yang didukung oleh 21 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2023	Triwulan IV	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan bersaing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	37,83	36,02	95,22
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	31,76	29,43	92,66
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	60	79	131,67
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000	10.212	102,12
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	158,71	158,71
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	10.000	17.173	171,73
		7	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	5.400	11.973	221,72

		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	90	100	111,11
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	2	2	100
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	105,26
		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	100	100
		12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	75	100	133,33
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayanyang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	5	5	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga kerja yang terlibat pada penge;lolaan perizinan dan kenelayanan (orang)	241.500	252.948	104,74
5	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayana	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	84	89,6	106,67
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	93	89,09	89,09
		17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	133,33	133,33

		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanna (persen)	75	61	81,33
		19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	77,5	82,27	106,15
		20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95	96,31	101,38
		21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,21	87,38	99,06

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2023. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2023.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan IV tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan IV tahun 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

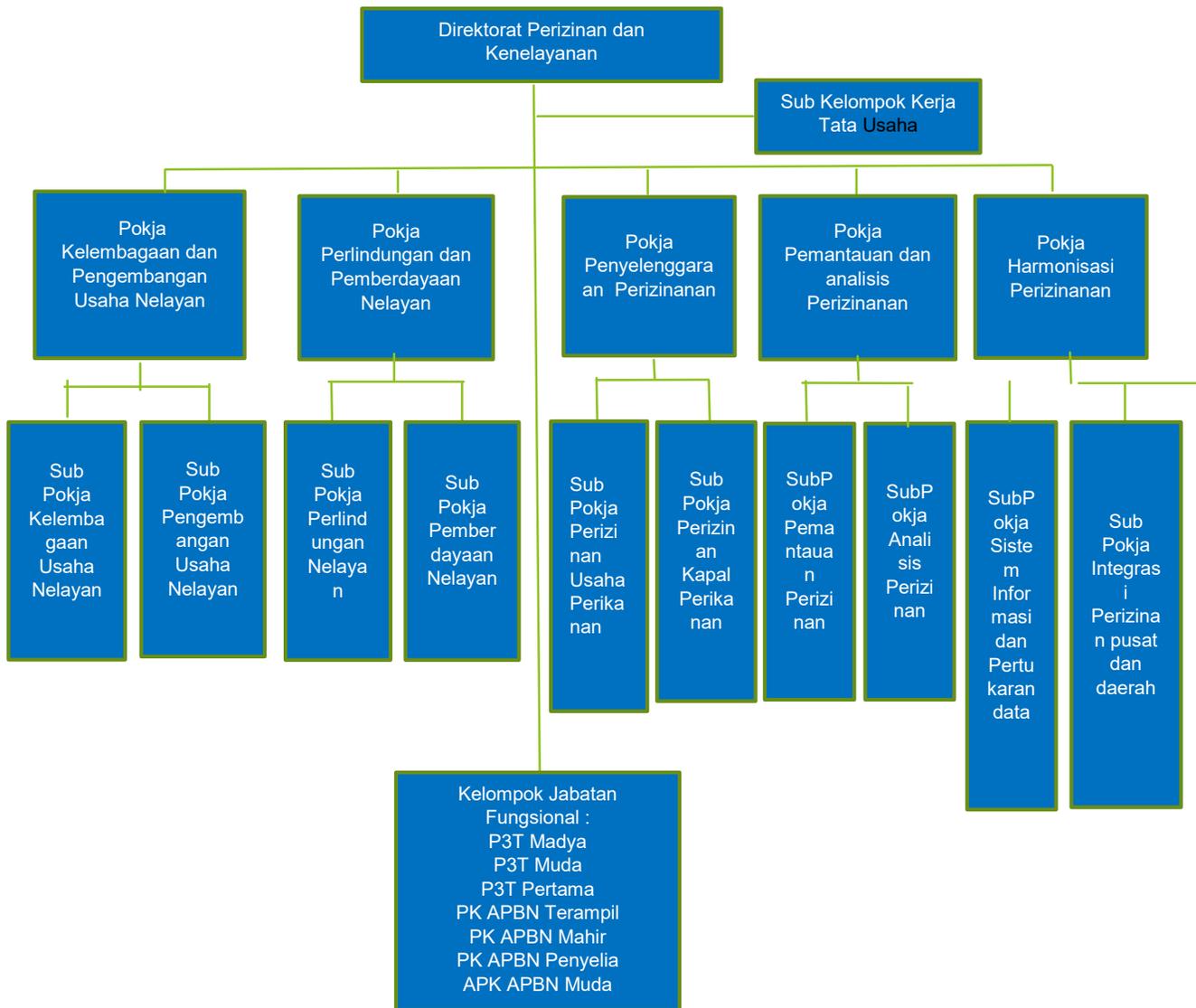
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Perizinan dan

Kenelayanan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusa tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Kelompok Kerja Perlindungan Nelayan**, yang terdiri atas Sub Pokja Kelembagaan Usaha Nelayan dan SubPokja Pengembangan Usaha Nelayan,
- b. **Kelompok Kerja Pemberdayaan Nelayan**, terdiri atas SubPokja Perlindungan Nelayan dan SubPokja Pemberdayaan Nelayan,
- c. **Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perizinan**, yang terdiri atas SubPokja Perizinan Usaha Perikanan dan SubPokja Perizinan Kapal Perikanan
- d. **Kelompok Kerja Pemantauan dan Analisis Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Pemantauan Perizinan dan SubPokja Analisis Perizinan,
- e. **Kelompok Kerja Harmonisasi Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Sistem Informasi dan Pertukaran Data Perizinan dan SubPokja Integrasi Perizinan Pusat dan Daerah
- f. **Sub Kelompok Kerja Dukungan Manajerial**; dan
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Mahir
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
 - Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Muda



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulanan sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui perizinan;
2. Penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui perizinan

Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki MOTO ‘**Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi**’. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Perizinan dan Kenelayanan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.

3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2025, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayan Tahun 2023.

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
1	Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	37,83
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	31,76
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	60
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	10.000
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	5.400
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	90
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	2
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95

		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
		12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	75
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	5
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (orang)	241.500
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
5	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	84
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	93
		17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75
		19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	77,5
		20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95
		21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,21

Pada Tahun 2023 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan tangkap telah melalui beberapa revisi. Revisi terakhir adalah sebesar Rp. 125.395.471.000,- Triliun dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2023

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	1,500,000,000
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1,500,000,000
3	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	39,352,471,000
4	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	998,770,,000
5	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	5,894,730,000
6	Nelayan yang yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1,290,500,000

7	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2,645,000,000
8	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (MP Korporasi)	1.100.000.000
9	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Koperasi)	6.375.000.000
10	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	58.076.000.000
11	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2,000,000,000
12	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	4,663,000,000
TOTAL		125.395.471,000

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca validasi tim kerja Tahun 2023

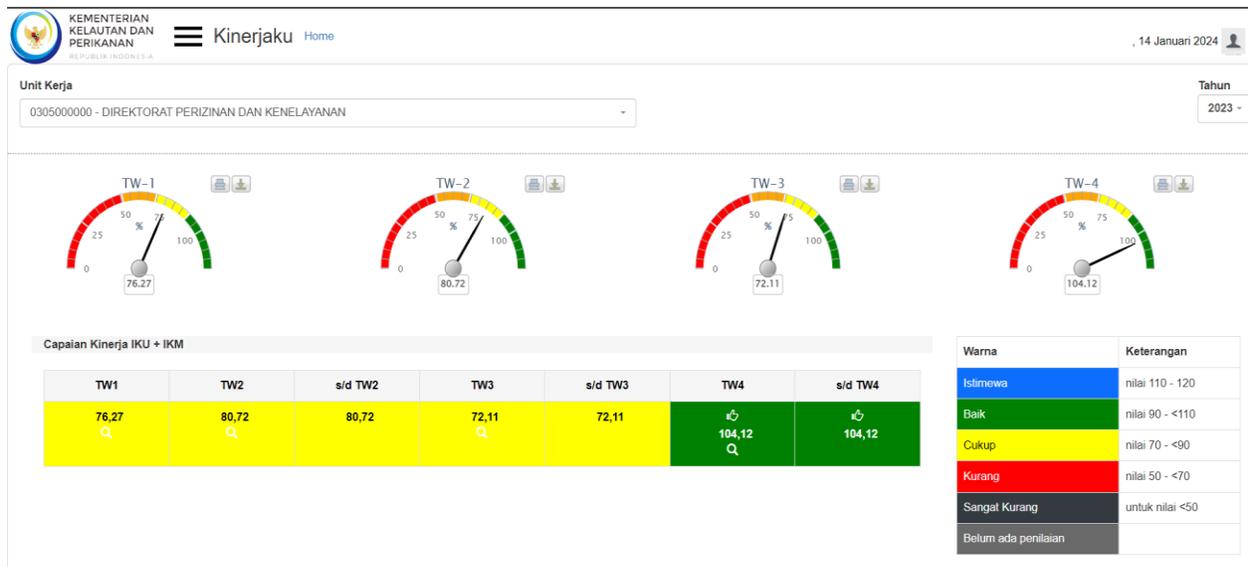
NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1 Penyusunan / reuiu juknis kelembagaan nelayan
		2 Sosialisasi dan identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi nelayan)
		3 Supervisi dan evaluasi penguatan kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi)
		4 Penyusunan juknis kampung nelayan maju
		5 Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kampung nelayan maju
		6 Pendataan identitas nelayan
		7 Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungan

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan perizinan pusat dan daerah 2. Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah 3. Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP)
3	Jumlah Korporasi nelayan yang dikembangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendampingan pengembangan korporasi nelayan 2 Reviu dan sosialisasi bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan 3 Pelaksanaan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan 4 Supervisi dan evaluasi bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan
4	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (PDK)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendataan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenelayanan

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pasca validasi tim kerja , terdapat 5 (Lima) sasaran kegiatan dan 21 (Duapuluh satu) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh nilai sebesar 104,12%. Capaian ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang memperoleh capaian sebesar 104,18%. Dan jika dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, angka ini jauh lebih tinggi. Adanya perubahan mekanisme kerja pada triwulan IV sangat mempengaruhi nilai capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Perubahan mekanisme kerja ini menasar pada pembentukan tim kerja. Pembentukan tim kerja melakukan perubahan atas indikator kinerja unit organisasi. Pada

triwulan IV, Direktorat Perizinan dan Kenelayan memiliki 5 Sasaran kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Tidak seperti triwulan sebelumnya, pada triwulan IV ini, IKU PNBPN sudah tidak menjadi bagian dari IKU Direktorat Perizinan dan Kenelayan. Perlu diketahui bahwa IKU PNBPN sejak awal periode pelaporan di tahun 2023, tidak pernah mencapai target yang sudah di tentukan setiap triwulannya (target triwulan). Hal ini disebabkan karena adanya peralihan pungutan hasil perikanan dari pra bayar menjadi pasca bayar. Rendahnya nilai pungutan PNBPN ini merupakan salah satu penyebab rendahnya pencapaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayan pada periode sebelumnya. Capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayan pada periode akhir Tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari pencapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2023. Dimana pencapaian kegiatan pada tahun ini sudah sangat baik. Hal ini bisa kita lihat dari pencapaian di setiap indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerja yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perizinan dan Kenelayan, pasca validasi tim kerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023		
				Triwulan IV	% thd Target TW IV	
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	37,83	36,02	95,22
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	31,76	29,43	92,66
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	60	79	131,67
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000	10.212	102,12
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	158,71	158,71
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	10.000	17.173	171,73
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	5.400	11.973	221,72
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	90	100	111,11
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	2	2	100
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	105,26
		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor	100	100	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	
				Triwulan IV	% thd Target TW IV
		penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)			
		12 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	75	100	133,33
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13 Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	5	5	100
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (orang)	241.500	252.948	104,74
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
5	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	15 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (Indeks)	84	89,6	106,67
		16 Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	93	89,09	95,80
		17 Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	133,33	144,92
		18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	75	61	81,33
		19 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	77,5	82,27	106,155
		20 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	95	96,31	101,38
		21 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,21	87,38	99,06

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (Lima) indikator yakni (1) Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya, (2) Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan, (3) Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung

nelayan maju, (4) Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan, (5) Persentase nelayan yang terlindungi

1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang meningkat kapasitasnya

Persentase Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya adalah kelompok usaha bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi (1) Akses pendanaan dari lembaga keuangan, (2) Kegiatan pembinaan kelembagaan (KUB) bimbingan teknis administrative, manajerial, sumber daya manusia dll (3) Kegiatan pembinaan usaha KUB (Bimbingan teknis usaha penangkapan ikan, bantuan sarana usaha, bimbingan teknis diversifikasi usaha, dll). Adapun jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan fasilitasi kegiatan akses pendanaan tahun 2023 sebanyak 150 KUB. Capaian KUB yang telah mendapat kan fasilitasi akses pendanaan sebnyak 152 KUB. Atau sebesar 101,33% dari target. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan sebanyak 400 KUB. Capaian KUB yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan kelembagaan sebanyak 402 KUB atau sebesar 100,5% dari target. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan usaha sebnyak 150 KUB. Capaian KUB yang telah mendapat fasilitasi pembinaan usaha sebanyak 153 KUB atau sebesar 102% dari target. Adapun capaian persentase KUB yang meningkat kapasitasnya adalah sebesar 36,02 atau sebesar 95,22% dari target 37,83 (target tw IV). Meskipun capaian IKU ini tidak mencapai target akan tetapi nilai capaian sudah sangat baik. Adapun keberhasilan pencapaian KUB tidak lepas dari sosialisasi dan pendampingan yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Permasalahan terjadi ketika koordinasi pembinaan KUB antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, kurangnya akses bantuan, informasi dan tekhnologi yang menunjang operasional peningkatan KUB juga bisa menghambat tercapainya pelaksanaan peningkatan kapasitas KUB .

Tabel. 5 Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	37,83	37,83	36,02	95,22

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU beberapa tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru. Meskipun demikian kegiatan peningkatan KUB merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, namun tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

2. Persentase Nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan.

Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan adalah peningkatan jumlah nelayan yang terdaftar dalam system pendataan nelayan pada aplikasi satu data KKP hingga dikeluarkannya nomor register kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) dibidang penangkapan ikan. Aplikasi satu data KKP dapat diakses pada laman <https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php>.

Tabel. 7 Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase Nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan	31,76	31,76	29,43	92,66

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelum karena IKU ini merupakan IKU baru.

3. Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju .

Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju adalah kampung nelayan yang dibangun atau diperbaiki fasilitas umum dan fasilitas usahanya melalui kegiatan yang berasal dari pendanaan oleh instansi pemerintah, BUMN, Swasta atau swadaya masyarakat. Tujuan dari penataan kampung nelayan maju (kalaju) adalah adalah terciptanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan sarana dan prasarana umum seperti jalan, drainase lingkungan dll. Sarana pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih dan MCK. Pada tahun 2023 telah ditargetkan 60 lokasi kalaju dengan capaian 79 lokasi di 62 Kabupaten/kota yang tersebar di 25 provinsi yang ada di Indonesia. Ditambah dengan 1 lokasi kampung nelayan maju modern. Kampung nelayan maju modern terletak di Desa Samber dan Binyeri, Biak Numfor Papua yang diresmikan langsung oleh Presiden RI tanggal 24 November 2023. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dari pihak pemerintah dalam hal ini kementerian / Lembaga dan pihak swasta serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi hambatan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah anggaran yang terbatas sehingga pencapaian di setiap lokasi bisa saja berbeda. Namun demikian kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya diharapkan dapat mewujudkan kampung

nelayan yang benar – benar tertata dan maju baik dari segi ketersediaan fasilitas umum yang memadai, maupun dari segi penyediaan air bersih dan lingkungan yang bersih.

Karena IKU ini baru ada 2 tahun belakangan ini yaitu ditahun 2022 dan tahun 2023, maka capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian di 5 tahun sebelumnya.

Tabel. 8 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju	60	60	79	131,67

4. Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan .

Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan adalah nelayan yang memiliki tanah baik lahan hunian maupun lahan kosong/produktif untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi bersertifikat sesuai dengan ketentuan. Kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan (bank dan non bank). Adapun kegiatan dilakukan berupa sosialisasi pra dan pasca SeHAT nelayan, identifikasi lapang dan pendampingan. Target tahun 2023 sebanyak 10.000 CPCL dengan capaian sebanyak 10.212 atau sebesar 102,12% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capain IKU ini tidak lepas dari kerjasama pemerintah dalam hal ini Kementerian / Lembaga dengan pihak pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Namun demikian kegiatan ini juga tidak serta merta lepas dari persoalan – persoalan dan hambatan yang terjadi dilapangan. Seperti kurang maksimalnya sosialisasi terkait program SeHAT nelayan sehingga informasi terkait program ini tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian factor penghambat lainnya adalah status kepemilikan tanah sehingga menyebabkan sulitnya dilakukan sertifikasi tanah. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala – kendala dilapangan yaitu dengan melakukan memaksimalkan sosialisasi serta pendampingan kepada nelayan sebelum dan setelah sertifikasi.

Tabel. 9 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	10.000	10.000	10.212	102,12

Table 10 Perbandingan Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan.

SK 1 Pengelolaan kenelayanan Maju dan berdaya saing											
IKU 4 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan											
Realisasi THN 2017-2021					Realisasi THN 2023					Renstra DJPT	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi	Realisasi thd target TW IV	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra
-	-	2295	12896	9734	10000	10000	10212	102,12	102,12	100	10212

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian kegiatan ini senantiasa mengalami kenaikan. Meskipun di tahun – tahun sebelumnya IKU ini tidak masuk dalam indikator kinerja utama Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, akan tetapi kegiatan IKU ini menjadi bagian pembentuk indikator kinerja utama (IKU) direktorat. Sehingga capaiannya masih bisa dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya seperti yang dapat kita lihat pada tabel.

5. Persentase nelayan yang terlindungi .

Persentase nelayan yang terlindungi adalah nelayan yang terlindungi dalam kegiatan penangkapan ikan baik terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan. Fasilitas yang dilakukan dapat berupa penyediaan logistic perbekalan melaut maupun fasilitas asuransi nelayan mandiri. Tujuan fasilitas asuransi nelayan mandiri adalah untuk menjembatani mitra asuransi untuk dapat menyampaikan informasi terkait produk asuransi nelayan yang dimiliki kepada nelayan. Selain itu fasilitas asuransi nelayan mandiri juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nelayan untuk dapat berasuransi secara mandiri, mengingat nelayan merupakan profesi yang rentan terhadap resiko kecelakaan. Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas kegiatan asuransi nelayan mandiri tahun 2023 adalah sebanyak 1.800 orang. Dengan capaian sebanyak 4.622 orang atau sebesar 158,71% dari target tahunan yang sudah ditetapkan. Dimana capaian asuransi nelayan mandiri ini diperoleh dari kabupaten Cirebon sebanyak 7 orang, Tanjung Jabung Barat sebanyak 244 orang, Langkat, Sumatera

Utara sebanyak 1.362 orang, Lombok tengah sebanyak 465 orang, Kabupaten Bone sebanyak 225 orang, Bandar Lampung sebanyak 450 orang, Tulung agung sebanyak 73 orang, Indramayu sebanyak 1.796 orang dan Trenggalek sebanyak 969 orang. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini pihak perbankan. Adapun penghambat dari capaian IKU ini adalah kurangnya sosialisasi kepada nelayan sehingga informasi terkait pentingnya asuransi tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya informasi yang diperoleh menyebabkan masih banyak nelayan yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi secara mandiri karena khawatir proses yang ribet dan biaya asuransi yang mahal. Pada tahun - tahun sebelumnya IKU persentase nelayan yang terlindungi, tidak menjadi Indikator utama dalam perhitungan capaian, namun demikian kegiatan asuransi nelayan menjadi bagian dari penghitungan IKU , dimana kegiatan ini sudah dilakukan setiap tahunnya baik itu dalam bentuk asuransi nelayan mandiri atau dalam bentuk BPAN . meskipun kegiatan ini sudah dilakukan setiap tahunnya akan tetapi Nilai capaian IKU persentase nelayan mandiri ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IKU ini hanya menghitung capaian persentasenya saja bukan menghitung jumlah nelayan peserta asuransinya baik secara mandiri maupun lewat program BPAN seperti IKU ditahun – tahun sebelumnya.

Tabel. 11 Persentase nelayan yang terlindungi

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase nelayan yang terlindungi	100	100	158,71	158,71

3.2.2 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (6) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur. Adapun capaian indikator dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini

adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Dan yang terbaru saat ini adalah adanya aplikasi E-PIT yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi ini menitik beratkan pada penangkapan ikan terukur. Sampai saat ini aplikasi ini juga masih terus dilakukan sosialisasi.

1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 (triwulan IV) terdapat perubahan dimana capaian yang dihitung tidak lagi berupa persentase. Capaian dihitung dari jumlah alokasi perizinan yang terbit saja. Dengan demikian perbandingan IKU ini belum dapat dilakukan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian alokasi perizinan masih dapat kita bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2022 dan 2021) . seperti pada table yang ada dibawah.

Tabel. 11 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

Satuan : alokasi kapal

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	10.000	10.000	17.173	171,73

Tabel. 12 Perbandingan capaian alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan.

SK 2		Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan										
IKU 6		Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan										
Realisasi THN 2017-2021					Realisasi THN 2023					Renstra DJPT		
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi	Realisasi thd target TW IV	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra	
-	-		9.428	11.244	10.000	10.000	17.173	171,73	171,73	100	17173	

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan .

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) yang diterbitkan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi . Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan). Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini juga bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 (triwulan IV) terdapat perubahan dimana capaian yang dihitung tidak lagi berupa persentase. Capaian dihitung dari jumlah dokumen perizinan yang terbit saja (realisasi kapal). Dengan demikian perbandingan IKU ini belum dapat dilakukan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian capaian dokumen perizinan masih dapat kita bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya (2022 dan 2021) . seperti pada table yang ada dibawah.

Tabel. 12 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	5.400	5.400	11.973	221,72

Table. 13 Perbandingan capaian dokumen perizinan (realisasi kapal)

SK 2		Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan									
IKU 7		Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)									
Realisasi THN 2017-2021					Realisasi THN 2023					Renstra DJPT	
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi	Realisasi thd target TW IV	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra
-	-		5.478	6.789	5.400	5.400	11.973	221,7222	221,7222	100	11973

3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti .

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi hasil analisis perizinan yang ditindaklanjuti berupa permohonan suspend kapal. Dimana permohonan suspend kapal yang masuk sebanyak 221 permohonan dan sudah ditindaklanjuti semua. Dengan demikian capaian persentase rekomendasi hasil analisis yang ditindaklanjuti sebesar 100%. IKU Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapaun pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh

Tabel.13 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	90	90	100	111,11

4 . Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil resiko. Analisis profil resiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

- Jumlah billing terbit, tidak dilunasi melebihi tanggal jatuh tempo sejak tanggal kedatangan kapal
- Nilai laporan perhitungan mandiri (LPM), dibawah rata – rata
- Kepatuhan aturan logbook kapal penangkapan ikan

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil resiko sbb :

- Nilai total < 25 = Resiko Rendah
- Nilai total 20 – 50 = Resiko Sedang
- Nilai total >50 = Resiko Tinggi

Dari penilaian profil resiko tersebut selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia (Izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan :

Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Persentase pelaku usaha dengan profil resiko rendah terhadap seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

- < 40%
- 40% - 50 %
- 51% - 60%
- 61% - 70%
- 71% - 80%
- 81% - 90%
- >90%

Tabel.14 Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : skala/nilai

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	2	2	2	100

Seperti halnya dengan IKU sebelumnya, IKU Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapaun pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh

5. Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi.

Tabel.15 Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95	95	100	105,26

IKU Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan juga merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh

6. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA center selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. IKU Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan juga merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh

Tabel.16 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	100	100	100

7. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur adalah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap .

Tabel.17 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	75	75	100	133,33

IKU Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3.2.3 Korporasi nelayan yang dikembangkan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan . Korporasi nelayan yang dikembangkan adalah kelompok nelayan atau KUB yang bergabung dalam suatu badan usaha berbadan hukum koperasi untuk menyelenggarakan usaha dalam kerangka model korporasi nelayan melalui tahapan (1) pengembangan kelembagaan dan model bisnis, (2) penguatan sarana usaha dan kualitas SDM. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan :” Koperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi nelayan merupakan kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korporasi nelayan yang berbadan hukum. Tujuan korporasi adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan. Adapun sasaran bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan yaitu koperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Adapun indikator keberhasilannya adalah (1) tersalurkannya bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan dengan tepat sasaran (2) Termanfaatkannya bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan oleh penerima bantuan.

Adapun jenis kegiatan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi berupa pemberian bantuan sarana dalam bentuk barang dengan spesifikasi bantuan meliputi sarana penunjang usaha perikanan, peralatan dan mesin penunjang usaha perikanan, peralatan perkantoran, dan alat pengolah data. Sampai saat ini kegiatan korporasi sudah memperoleh capaian sebanyak 5 korporasi yang ditetapkan di 5 lokasi sbb :

- 1) **Banyuwangi, Koperasi Berkah Mina Lestari.** Koperasi Berkah Mina Berkah Lestari berdiri pada tahun 2023 dengan nomor pengesahan 21/tanggal 27 Juli/2023 dengan jenis usaha penangkapan ikan, pengelolaan sampah, perikanan non penangkapan dan pengolahan ikan. Koperasi Berkah Mina Lestari memiliki 9 keanggotaan yang terdiri dari 5 KUB dan 4 Pokmas. Adapun bidang atau unit usaha yang sudah berjalan adalah, penangkapan ikan, pengolahan ikan, pengemasan dan pemasaran ikan.
- 2) **Biak Numfor, Koperasi Samber Binyeri Maju.** Koperasi Samber Binyeri Maju berdiri pada tahun 2023 dengan nomor pengesahan 11 Tanggal 29 Agustus 2023 dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Adapun bidang usaha yang dijalankan adalah perdagangan eceran hasil perikanan dan penangkapan ikan bersirip dilaut.
- 3) **Bandar Lampung, Koperasi Nelayan Kalaju Pulau Pasaran.** Koperasi Nelayan Kalaju Pulau Pasaran berdir pada tahun 2023 dengan nomor pengesahan 02 tanggal 15 Agustus 2023 dengan jenis usaha penangkapan dan pengolahan ikan serta budidaya

teripang. Koperasi Nelayan Kalaju Pulau Pasaran memiliki keanggotaan sebanyak 12 anggota yang terdiri dari 5 KUB, 5 Poklahsar, 1 Pokdakan dan 1 Pokmas.

- 4) **Wakatobi, Koperasi Nelayan Samata Padakkau.** Koperasi Nelayan Samata Padakkau berdiri pada tahun 2019 dengan nomor pengesahan 05 tanggal 8 Oktober 2019. Koperasi Nelayan Samata Padakkau memiliki 3 keanggotaan yang terdiri dari 3 KUB dengan jenis usaha penangkapan ikan.
- 5) **Kota Kupang, Koperasi Bintang Laut Sejahtera.** Koperasi Bintang Laut Sejahtera.

Adapun capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada 2 tahun sebelumnya (Tahun 2022 dan Tahun 2023). Dimana capaian IKU tahun sebelumnya tercapai 1 korporasi, sedangkan di tahun 2023 ini capaian IKU memperoleh capaian sebanyak 5 korporasi. Jadi terdapat peningkatan sebanyak 4 korporasi dari tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat setempat, serta kerjasama dengan pihak – pihak terkait. Adapun kendala yang menjadiao factor penghambat capaian diantaranya keterbatasan skill SDM terkait tekhnis dan manajemen usaha sehingga manajemen usaha lemah serta pendampingan yang dilakukan kurang maksimal.

3.2.4 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan. Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK adalah jumlah tenaga kerja yang terlbat dalam seluruh kegiatan yang terkait dalam pengelolaan perizinan dan kenelayanan. Perghitungan indikator ini dilakukan dengan menghitung semua jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh kegiatan terkait pengelolaan perizinan dan kenelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja yang dimaksud adalah petugas KKMB dan pojok pendanaan, petugas identifikasi CPCL SEHAT nelayan, instruktur/trainer dan petugas pendamping pada kegiatan diversifikasi usaha, tenaga kerja pada lembaga keuangan, petugas dan penyuluh perikanan pendamping BPAN, anggota KUB yang terlibat dalam penguatan kelembagaan, tenaga kerja persiapan kampung nelayan maju, pelaku usaha perorangan pengguna aplikasi SILAT dan SIMKADA, serta operator SIMKADA.

Adapun capaian indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK tahun 2023 adalah sebanyak 252.948 orang. Capain ini diperoleh dari kegiatan Kalaju sebanyak 2.617 orang, kegiatan SeHAT sebanyak 10.212 orang, kegiatan diversifikasi sebanyak 3.690 orang, kegiatan pendanaan sebanyak 1.749 orang, kegoiatan KUB sebanyak 3.040 orang, kegiatan baknel sebanyak 109.000 orang, kegiatan asuransi nelayan mandiri sebanyak 5.591 orang dan kegiata KUSUKA sebanyak 117.049 orang. Tenaga kerja terdiri dari tenaga pendamping, penyuluh perikanan, nelayan, tenaga buruh yang bekerja pada pembangunan kampung nelayan maju dan lain – lain.

Tabel. 18 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Satuan : orang

Nama IKU	Target Tahun 2023	Capaian Triwulan IV	%
Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK.	241.500	252.948	104,74

3.2.5 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (2) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat perizinan dan kenelayanan (3) Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system pengetahuan yang terstandar (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat perizinan dan kenelayanan (5) Tingkat evektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat perizinan dan kenelayanan (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan keneayanan, (7) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Tahun 2023, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh capaian sebesar 89,6 atau sebesar 106.67% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Capaian ini memperoleh predikat tinggi. Capaian ini diperoleh dari penilaian kualifikasi pendidikan memperoleh indeks sebesar 21,44 dengan bobot 85,76%. Penilaian kompetensi memperoleh indeks sebesar 38,16 dengan persentase capaian sebesar 95,4%. Penilaian kinerja memperoleh indeks sebesar 25 dengan persentase capaian sebesar 83,33%. Kemudian yang terakhir penilaian kedisiplinan memperoleh indeks 5 dengan persentase capaian 100% sehingga diperoleh nilai total sebesar 89,6. Dengan total pegawai yang dinilai sebanyak 59 pegawai. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari andil seluruh pegawai yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Kesadaran

dalam meningkatkan kompetensi melalui keikutsertaan pada kegiatan seminar , bimtek dll. Tidak hanya itu kesadaran akan kedisiplinan juga menjadi factor penyebab keberhasilan capaian IKU ini. Adapun factor – factor yang menjadi penghambat capaian diantaranya kurangnya minat pegawai dalam mengikuti pelatihan, seminar atau bimtek yang dilaksanakan di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan atau lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri. Dan masih banyak factor lagi yang menjadi penghambat capaian.

Tabel. 19 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target Tahun TW IV	Capaian Tahun 2023	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan	84	84	89,6	106,67

Tabel. 20 Perbandingan capaian IP ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

SK 6		Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 15		IP ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2023					Renstra DJPT		
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi thd target TW IV Thn 2023	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra	
-	79,15	80,13	54,22	83,83	84	84	89,6	106,67	106,67	80	112	

2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun tujuan rekonsiliasi itu sendiri adalah (1) meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, (2) meningkatkan konsistensi penerpan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, (3) memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Output rekonsiliasi menggambarkan nilai kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian serta ketepatan masing masing unit kerja. Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan tahun 2023 adalah 89,09 dengan target 93 atau sebesar 95,80% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Nilai capaian yang berada dibawah target ini disebabkan rendahnya nilai capaian SS pada periode pelaporan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai target yang ditentukan sebelumnya.

Tabel 21. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target Tahun TW IV	Capaian Tahun 2023	%
Nilai Rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	93	93	89,09	95,80

Sistem Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penerapan manajemen pengetahuan lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan dilakukan melalui 3 komponen yakni : (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dalam aplikasi Bitrix24 KKP dan (3) Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP. Adapun capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2023 adalah sebesar 133,33 atau sebesar 144,92% dari target tahunan.

Tabel 21. Persentase Unit Dit. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian Triwulan IV	%
Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	92	92	133,33	144,92

4. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2023. Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan terdapat beberapa terdapat 1 temuan yang menjadi objek pengawasan yakni evaluasi pelayanan publik pada Dit. PDK tahun 2022 dengan jumlah saran sebanyak 9 saran dari 1 kasus temuan awal. Namun demikian dari 1 kasus temuan, saran yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7 saran. 2 saran masih dalam proses. sehingga capaian tahun 2023 adalah sebesar 61%. Atau sebesar **81,33%** dari target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rendahnya pencapaian IKU ini disebabkan masih terdapatnya hasil temuan yang belum ditindak lanjuti, atau sudah ditindak lanjuti tapi status masih dalam proses atau sudah ada tindak lanjut namun belum di input dalam aplikasi sidak.kkp

Tabel. 22 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian Triwulan IV	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	75	75	61	81,33

Tabel. 23 Perbandingan capaian rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

SK 6 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan											
IKU 18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. PDK											
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2023					Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi thd target TW IV Thn 2023	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra
-		129,63	19,35	100	75	75	61	81,33	81,33	80	76,25

IKU Persentase hasil rekomendasi pengawasan pada tahun 2018-2019 tidak dimasukkan dalam PK Level 2, sehingga tidak dilakukan penghitungan terhadap IKU ini. Barulah pada tahun 2020 penghitungan IKU ini mulai dilakukan secara triwulan . sehingga jika kita lihat dari table diatas, dapat disimpulkan nilai capaian tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

5. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Adapun kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
- Memiliki anggaran yang besar
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP
- Mendukung capaian prioritas nasional
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan

Adapun kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menjadi objek penilain efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas di tahun 2023 adalah kegiatan Kampung Nelayan Maju (**KALAJU**). "**KALAJU**" merupakan kegiatan penataan kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Pada tahun 2023 , Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh nilai capaian sebesar 82,27. Capaian ini sudah sangat baik melihat nilai capaian berada diatas nilai target tahun 2023. Pencapaian diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya.

Tabel. 23 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Capaian Triwulan IV	%
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	77,5	82,27	106,15

Tabel. 24 Perbandingan capaian tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan

SK 6	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dit. Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 19	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
Realisasi Tahun 2017-2021					Realisasi 2023					Renstra DJPT	
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Thn. 2023	Target TW IV	Realisasi TW IV	Realisasi thd target TW IV Thn 2023	Realisasi thd target Thn. 2023	Target Renstra 2024	% capaian TW IV thd target akhir Renstra
-	-	92,93	86,69	96,15	77,5	77,5	82,27	106,15	106,15	80	102,8375

Berdasarkan tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa Capaian IKU ini masih dibawah capaian tahun – tahun sebelumnya. Atau bisa dikatakan capaian mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan ada beberapa lokasi kalaju yang kondisi bangunan seperti MCK dan balai desa tidak sudah tidak terawat sehingga nilai pemanfaatannya dinilai kurang. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen penilaian IKU ini diperoleh dari 3 aspek yaitu; (1) Aspek Pemanfaatan, (2) Aspek Integrasi dan (3) Aspek Adaptasi. Ketika salah satu aspek penilaian mendapat nilai rendah maka akan mempengaruhi nilai capaian. Seperti yang terjadi pada tahun 2023 ini.

6. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan skema Automatic Adjustment (AA), secara otomatis mengurangi kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengevaluasi kembali rencana aksi yang sudah dibuat sebelumnya sekaligus menyusun rencana aksi kegiatan berikutnya dengan merevisi kembali kegiatan berikut anggarannya agar bisa dipergunakan secara efektif dan efisien. Capaian persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan tahun 2023 adalah 96,31% atau sebesar 101,38% dari total pagu keseluruhan. Dengan serapan anggaran terbesar ada pada kegiatan izin berusaha subsektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan dengan total serapan anggaran sebesar 99,93% dan serapan anggaran terkecil terdapat pada kegiatan izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan dengan total serapan anggaran sebesar 81,66% .

Tabel. 25 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan kenelayanan.

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2023	Target TW IV	Capaian TW IV Thn. 2023	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan	95	95	96,31	101,38

Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2022), capaian IKU ini sedikit lebih rendah atau mengalami penurunan. Dimana tahun 2022 IKU ini memperoleh capaian sebesar 99,80% atau sebesar 105,05% dari total pagu.

7. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapaun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat

Perizinan dan Kenelayanan tahun 2023 adalah sebesar 87,38. Adapun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.446.149.000,-,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-DIPA-032.03.1.238720/2023 tanggal 20 November 2022. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan anggaran pemerintah, maka pada periode Triwulan IV tahun 2023, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan setelah melalui revisi anggaran , memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 125.395.471.000,- triliun dengan capaian realisasi sebesar Rp. 120.771.161.257,- miliar atau sebesar 96,31% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2023, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

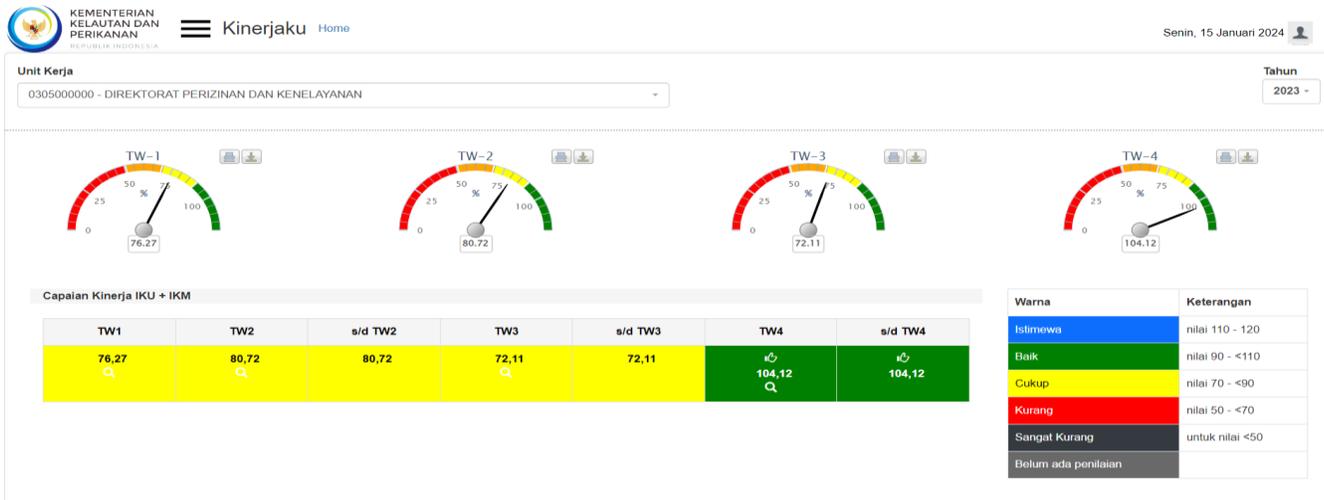
Tabel 25. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023, Berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.500.000.000,-	1.498.912.050,-	99,93
2.	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	39.352.471.000,-	36.194.576.296,-	91,98
3.	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2.000.000.000,-	1.997.360.188,-	99,87
4.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.500.000.000,-	1.224.846,-	81,66
5.	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	998.770.000,-	964.378.095,-	96,56
6.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	5.894.730.000,-	5.428.748.387,-	92,09
7.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.290.500.000,-	1.257.067.322,-	98,80
8.	Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2.645.000.000,-	2.634.205.440,-	99,59
10.	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	1.100.000.000,-	1.090.294.985,-	99,12
11.	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	58.076.000.000,-	58.058.537.887,-	99,97
12.	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	6.375.000.000,-	6.372.882.560,-	99,97
13.	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	4.663.000.000,-	4.031.352.047	86,45
	TOTAL	125.395.471.000,-	120.771.161.257,-	96,31

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 104,12 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



Gambar 3
Dashboard KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%	Tgl Input
SK.01	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing						104,80			104,80		
IKSK.01.1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen) Data Dukung1 Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	37,83	37,83	36,02	95,22	37,83	36,02	95,22	11-Jan-2024 10:56
IKSK.01.1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	37,83	37,83	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.01.2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan Data Dukung1 Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	31,76	31,76	29,43	92,66	31,76	29,43	92,66	11-Jan-2024 10:56
IKSK.01.2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	31,76	31,76	29,21	91,97	31,76	29,21	91,97	11-Jan-2024

IKSK.01.3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju Data Dukung1 Data Dukung2	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	60,00	79,00	120,00	60,00	79,00	120,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.01.3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju	lokasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	60,00	60,00	79,00	120,00	60,00	79,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.01.4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan Data Dukung1 Data Dukung2	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	10.212,00	102,12	10.000,00	10.212,00	102,12	11-Jan-2024 10:56
IKSK.01.4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	10.212,00	102,12	10.000,00	10.212,00	102,12	11-Jan-2024 11:05
IKSK.01.5	Persentase nelayan yang terlindungi Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	158,71	120,00	100,00	158,71	120,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.01.5	Persentase nelayan yang terlindungi	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Jan-2024 11:05
SK.02	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan						110,16			110,16		
IKSK.02.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Data Dukung1 Data Dukung2	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	17.173,00	120,00	10.000,00	17.173,00	120,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	17.173,00	120,00	10.000,00	17.173,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	17.173,00	120,00	10.000,00	17.173,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10.000,00	10.000,00	17.173,00	120,00	10.000,00	17.173,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan Data Dukung1	dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.400,00	5.400,00	11.973,00	120,00	5.400,00	11.973,00	120,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.400,00	5.400,00	11.973,00	120,00	5.400,00	11.973,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1	skala / nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	skala / nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.5	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.5	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.6	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.6	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11-Jan-2024 11:05
IKSK.02.7	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	100,00	120,00	75,00	100,00	120,00	11-Jan-2024 10:56
IKSK.02.7	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	100,00	120,00	75,00	100,00	120,00	11-Jan-2024 11:05
SK.03	Korporasi nelayan yang dikembangkan						100,00			100,00		
IKSK.03.1	Kelompok Nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan Data Dukung1 Data Dukung2	kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	11-Jan-2024 10:56

SK.04	Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan PDK							104,74			104,74		
IKSK.04.1	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 Data Dukung2	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	241.500,00	241.500,00	252.948,00	104,74	241.500,00	252.948,00	104,74	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.04.1	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	11-Jan-2024 11:05	
SK.05	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan							100,91			100,91		
IKSK.05.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 Data Dukung2	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	84,00	89,60	106,67	84,00	89,60	106,67	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84,00	84,00	87,27	103,89	84,00	87,27	103,89	11-Jan-2024 11:05	
IKSK.05.2	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 Data Dukung2	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	93,00	89,09	95,80	93,00	89,09	95,80	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.3	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	133,33	120,00	92,00	133,33	120,00	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.4	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	61,00	81,33	75,00	61,00	81,33	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.5	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	82,27	106,15	77,50	82,27	106,15	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.6	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	96,31	101,38	95,00	96,31	101,38	11-Jan-2024 10:56	
IKSK.05.7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,21	88,21	87,38	99,06	88,21	87,38	99,06	11-Jan-2024 10:56	
Tutup													

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sudah sangat baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna hijau pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti cukup (*gambar dashboard kinerja*), Namun jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama (triwulan IV), capaian ini tidak jauh berbeda. Dimana tahun lalu pada periode yang sama memperoleh angka sebesar **104,18%**. Dilihat dari segi *capaian per IKU, tidak terlihat* adanya indikator yang berwarna merah . rata – rata capaian menunjukkan indikator berwarna hijau yang menandakan capaian IKU sudah baik. Bahkan ada beberap IKU juga yang menunjukkan indikator berwarna biru yang berarti capaian IKU istimewa.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
 - a. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
 - b. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .

2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
- b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
- c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

DATA DUKUNG CAPAIAN
& DOKUMEN KEGIATAN

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM
NOMOR 55/DJPT.5/RC.610/I/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perizinan dan Kenelayanan
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023
Lampiran : satu berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.42/DJPT.1/TU.330/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan serta Verifikasi Pelaporan Berbasis Web Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA. 2023, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perizinan dan Kelelayanan
 Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	Sub IK	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2023	Triwulan IV	Perentase (%)
1. Peningkatan kelayakan maju dan bersaing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	37,53	36,52	95,22
	2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSLUKA) bidang perangkaban ikan (persen)	31,76	28,43	89,56
	3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi pembuatannya melalui program kampung nelayan maju (ribuan)	50	79	131,67
	4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan usahanya melalui program sertifikasi usaha nelayan (ribuan)	10.000	10.212	102,12
	5	Persentase nelayan yang terlatih	100	158,71	158,71
2. Peningkatan perizinan sesuai ketentuan	6	Akumulasi perizinan berusaha sub sector perangkaban ikan dan perizinan berusaha sub sector perangkaban ikan (Akumulasi kapal)	10.000	17.173	171,73
	7	Dokumen perizinan berusaha sub sector perangkaban ikan dan perizinan berusaha sub sector perangkaban ikan serta sertifikat kudo perangkaban ikan yang diterbitkan (dikumulasi)	5.400	11.973	221,72
	8	Persentase rekomendasi hasil analisa perizinan berusaha subsektor	90	100	111,11

		perangkaban ikan dan perangkaban ikan yang dibudidayakan			
	9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor perangkaban ikan dan perangkaban ikan (skala nasional)	2	2	100
	10	Persentase keefektifan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor perangkaban ikan dan perangkaban ikan (persen)	95	100	105,26
	11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor perangkaban ikan dan perangkaban ikan	100	100	100
	12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor perangkaban ikan dan perangkaban ikan dan kewenangan Gubernur (persen)	75	100	133,33
3. Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	5	5	100
4. Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kelelayanan (orang)	241.500	252.940	104,74
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kelelayanan	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kelelayanan (Indeks)	94	89,5	106,67
	16	Indeks rekomendasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kelelayanan (nilai)	93	88,38	95,15
	17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kelelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang	90	133,33	133,33

		berlander (persen)			
	18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimantapkan untuk perbaikan kinerja Inklusif Direktorat Perizinan dan Kamalayanan (persen)	75	81	81,33
	19	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kamalayanan (persen)	5	77	82,27
	20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kamalayanan (persen)	95	96,31	101,36
	21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat Inklusif Direktorat Perizinan dan Kamalayanan (indeks)	88,21	87,38	98,06

5

Lampiran 2. Memorandum

Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

- a. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing, IKU 1. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

PERSENTASE KELOMPOK USAHA BERSAMA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA			
	IKU	Kemendiknas	KETERANGAN
Pendanaan	3.000 Orang	100	Asumsi 1.800 + 10 nelayan + 1000 : 10
Kelembagaan	3000 KUB	500	
Stabilitas	3.000 Orang	150	Asumsi 1.800 + 10 nelayan + 1000 Nelayan + 3000 : 30
Gap	150		
IKU	300	1000/3000=33,33%	
KUB	300	1000/3000=33,33%	
SP	150	1000/3000=33,33%	
SPK	100	1000/3000=33,33%	
PKUB	1,01		
PKU/IKU	1,02		
PKUB =	36,02 %		

- b. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing IKU 2 Persentase Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan

CAPAIAN PENCATATAN KUSUKA PELAKU USAHA VALID

PROFESI	PELAKU USAHA		CAPAIAN PENDATAAN (%)
	KUSUKA	POTENSI	
NELAYAN	861.012	2.925.818	29,43
PEMASAR ANTAR PELABUHAN	5.301	4.013	132,1
PEMASAR IKAN	58.185	275.458	21,12
PEMBUDIDAYA IKAN	553.504	1.466.681	37,74
PENGOLAH IKAN	82.286	64.239	128,09
PETAMBAK GARAM	17.562	22.430	78,3

Sumber : Satu Data KKP tanggal 12 January 2024 jam 09:00 WIB

Keterangan : Capaian Pelaku Usaha tersebut meliputi jumlah profesi utama dan

Lampiran 3. Memorandum
 Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

- c. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing IKU 3 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)

CAPAIAN KAKUKU TAHUN 2021		A. Monev/evaluasi	
1. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.1. Monev/evaluasi	1.1. Monev/evaluasi
2. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.2. Monev/evaluasi	1.2. Monev/evaluasi
3. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.3. Monev/evaluasi	1.3. Monev/evaluasi
4. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.4. Monev/evaluasi	1.4. Monev/evaluasi
5. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.5. Monev/evaluasi	1.5. Monev/evaluasi
6. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.6. Monev/evaluasi	1.6. Monev/evaluasi
7. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.7. Monev/evaluasi	1.7. Monev/evaluasi
8. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.8. Monev/evaluasi	1.8. Monev/evaluasi
9. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.9. Monev/evaluasi	1.9. Monev/evaluasi
10. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.10. Monev/evaluasi	1.10. Monev/evaluasi
11. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.11. Monev/evaluasi	1.11. Monev/evaluasi
12. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.12. Monev/evaluasi	1.12. Monev/evaluasi
13. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.13. Monev/evaluasi	1.13. Monev/evaluasi
14. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.14. Monev/evaluasi	1.14. Monev/evaluasi
15. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.15. Monev/evaluasi	1.15. Monev/evaluasi
16. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.16. Monev/evaluasi	1.16. Monev/evaluasi
17. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.17. Monev/evaluasi	1.17. Monev/evaluasi
18. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.18. Monev/evaluasi	1.18. Monev/evaluasi
19. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.19. Monev/evaluasi	1.19. Monev/evaluasi
20. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	1.20. Monev/evaluasi	1.20. Monev/evaluasi

CAPAIAN KAKUKU TAHUN 2021		B. Monev/evaluasi	
1. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.1. Monev/evaluasi	2.1. Monev/evaluasi
2. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.2. Monev/evaluasi	2.2. Monev/evaluasi
3. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.3. Monev/evaluasi	2.3. Monev/evaluasi
4. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.4. Monev/evaluasi	2.4. Monev/evaluasi
5. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.5. Monev/evaluasi	2.5. Monev/evaluasi
6. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.6. Monev/evaluasi	2.6. Monev/evaluasi
7. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.7. Monev/evaluasi	2.7. Monev/evaluasi
8. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.8. Monev/evaluasi	2.8. Monev/evaluasi
9. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.9. Monev/evaluasi	2.9. Monev/evaluasi
10. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.10. Monev/evaluasi	2.10. Monev/evaluasi
11. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.11. Monev/evaluasi	2.11. Monev/evaluasi
12. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.12. Monev/evaluasi	2.12. Monev/evaluasi
13. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.13. Monev/evaluasi	2.13. Monev/evaluasi
14. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.14. Monev/evaluasi	2.14. Monev/evaluasi
15. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.15. Monev/evaluasi	2.15. Monev/evaluasi
16. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.16. Monev/evaluasi	2.16. Monev/evaluasi
17. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.17. Monev/evaluasi	2.17. Monev/evaluasi
18. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.18. Monev/evaluasi	2.18. Monev/evaluasi
19. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.19. Monev/evaluasi	2.19. Monev/evaluasi
20. Indikator: Penguatan Kualitas	Indikator: Penguatan Kualitas	2.20. Monev/evaluasi	2.20. Monev/evaluasi

Lampiran 4. Memorandum
 Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

- d. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing IKU 4 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

CAPAIAN IDENTIFIKASI SEHAT TAHUN 2023			
NO.	PROVINSI - KABUPATEN/KOTA	TARGET IDENTIFIKASI TAHUN 2023	CAPAIAN HASIL IDENTIFIKASI 2023
1	ACEH	200	150
2	SUMATERA UTARA	500	115
3	SUMATERA BARAT	400	542
4	RIAU	325	155
5	BANGKA BELITUNG	100	102
6	LAMPUNG	400	317
7	JAWA BARAT	1300	1363
8	BANTEN	650	210
9	JAWA TENGAH	1300	1208
10	JAWA TIMUR	1000	1474
11	NUSA TENGGARA BARAT	450	450
12	NUSA TENGGARA TIMUR	500	370
13	KALIMANTAN TENGAH	300	130
14	KALIMANTAN SELATAN	725	554
15	KALIMANTAN TIMUR	200	60
16	SULAWESI UTARA	415	430
17	SULAWESI TENGAH	1097	1023
18	SULAWESI BARAT	450	218
19	SULAWESI TENGGARA	250	237
20	SULAWESI SELATAN	720	641
21	MALUKU UTARA	300	100
	GORONTALO	300	240
	TOTAL	12.032	10.212

- e. SK1 Pengelolaan Kenelayanan maju dan berdaya saing IKU 5 Persentase nelayan yang terlindungi (orang)

Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas kegiatan asuransi mandiri tahun 2023 sebesar 1.800 orang , capaian tahun 2023 sebanyak 4.622 orang. Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas penyediaan logistic (Baknel) 34.000 orang , capaian tahun 2023 109.000 orang

Formula Perhitungan : $\text{Persentase nelayan yang terlindungi} = ((\text{FPU}/\text{TFPU} + \text{FPK}/\text{TFPK})/2) \times 100 \%$

Keterangan : FPU : jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas penyediaan logistik perbekalan melaut

TFPU : jumlah nelayan yang ditargetkan mendapatkan fasilitas penyediaan logistik perbekalan melaut pada tahun ini (34.000 orang)

FPK : jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas kegiatan asuransi nelayan mandiri

TFPK : jumlah nelayan yang ditargetkan mendapatkan fasilitas kegiatan asuransi nelayan mandiri pada tahun ini (1.800 orang) Satuan Pengukuran : persen

Persentase nelayan yang terlindungi = $((\text{FPU}/\text{TFPU} + \text{FPK}/\text{TFPK})/2) \times 100 \%$

$$= ((109.000/34.000 + 5.591/1.500) / 2) \times 100\%$$

$$= ((3,21 + 3,11) / 2) \times 100\%$$

$$= 158,71$$

CAPAIAN ASNELMAN TAHUN 2023

NO	LOKASI	JUMLAH PESERTA
1	CIREBON	7
2	TANJUNG JABUNG BARAT, KUALA TUNGKAL	244
3	LANGKAT SUMATERA UTARA	1302
4	LOMBOK TENGAH	465
5	KAB. BONE	229
6	BANDAR LAMPUNG	450
7	TULUNG AGUNG	72
8	INDRAMAYU	1780
9	TRENGGALEK	960
	TOTAL	5501

CAPAIAN BAKNEL TAHUN 2023

	LOKASI	PEKER
2	ACEH TENGGAH	2.000
2	JOMBANG, JATIM	2.000
4	SERANG, BANTEN	2.000
5	PURANG	2.000
6	TANGGAPUS, BANDAR LAMPUNG	2.000
7	KEDIRI, BLITAR	5.000
7	POLEWALITANDAR, SULAWI	2.000
9	BLITAR, JATIM	1.000
10	LAMPUNG TIMUR	4.000
11	TERNATE	2.000
12	MERANGKAP, PAPUA	2.000
12	BIREUN, ACEH	5.000
14	CILACAP	2.000
18	GARUT	2.000
18	TULUNG BAWANG	2.000
17	SUNDBURG	2.000
18	SUNDBURG	2.000
19	TINJUT TENGAH, KELOM	2.000
20	CIGURUK	2.000
21	KETOPANG	2.000
22	ENDE	1.000
23	PURWAKERTA	2.000
24	KERUBEH	2.000
28	BINGO	8.000
24	BOGOR	2.000
27	BAHYU, BBN	2.000
22	INDRAGATI	3.000
24	TRENGGALAN	2.000
26	KUDUS, BNS	2.000
24	PURWOREJO	4.000
22	HELWATI	2.000
25	KOTA KUPANG	2.000
24	GIRIBON	3.500
28	PALI	2.000
26	TANJUNG JABUNG TIMUR	2.000
27	PENJAJEN PA'CELU, UTARA	2.000
26	OIL, OAP	2.000
25	DESAH, DAHPATI	2.000
40	ASAHAN	2.000
41	KOTA WARRING, DANAT	2.000
42	HAGUH	2.000
43	SINGKAWANG DAN KUDU RAYA	2.000
44	PANGANDARAN	2.000
45	DEKASI	2.000
46	KAB. BONE	2.000
47	PADANG, SOLOK	2.000
	TOTAL	107.000

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelaku	Nama Pemilik	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Alasan Suspend
1	PP Suspend	AYU CHANDRA BERKASA	1318	CHANDRA MNS	11763	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
2	PP Suspend	DULBARH	1342	JAYA SARU	11624	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
3	PP Suspend	HERU SUSANTO	1181	DIPO KENCANA	11262	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
4	PP Suspend	JUMADI	1188	KICOTY TRIYA SANTIKA	11080	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
5	PP Suspend	PUTRA LEO NUSANTARA, PT	3681	PUTRA LEO COLLECTING - 01	6030	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
6	PP Suspend	PUTRA LEO NUSANTARA, PT	3681	PUTRA LEO PERKASA	4818	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
7	PP Suspend	SARFANI	1175	SARI MULYA	13865	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
8	PP Suspend	SIRI	7611	MARJUP MNS MULYA	13344	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
9	PP Suspend	SULTONI	3039	PUTRA ALKA - 2	6048	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
10	PP Suspend	SULTONI	3039	PUTRI KECOR	7218	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
11	PP Suspend	SUPRIPTO	5755	SIAMBA LAYAR SAKUDRA - 1	7218	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
12	PP Suspend	DAEK	3482	DEDI JAYA - 6	5817	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
13	PP Suspend	FANTONE SULAMAN	1631	BERBAGI SARUDERA 99	6562	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
14	PP Suspend	LEE KIM	7607	BENTANG TERANG	8508	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelaku	Nama Pemilik	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Alasan Suspend
15	PP Suspend	MESTRA ALAM MALEKIPPA MAHUR, PT	8812	KAPUNA MALEKIPPA AN	10382	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
16	PP Suspend	WENNY ANGGANI	1316	OLTA PERMA	6886	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
17	PP Suspend	AGUSTINANDI	8281	MANDRI	8376	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
18	PP Suspend	JOHN SANTOSO	4827	BANTANG SELAMAT	1816	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
19	PP Suspend	MARNOLO	1188	BANTANG MARYUD-04	7183	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
20	PP Suspend	NUTRINDO FREEDOOD INTERNASIONAL, PT	3077	NUTRINDO PMS	7388	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
21	PP Suspend	NUTRINDO FREEDOOD INTERNASIONAL, PT	3077	TARISLU PM - 20	6126	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
22	PP Suspend	NUTRINDO FREEDOOD INTERNASIONAL, PT	3077	TARISLU PM - 12	7386	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
23	PP Suspend	NUTRINDO FREEDOOD INTERNASIONAL, PT	3077	TARISLU PM - 04	11822	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
24	PP Suspend	PACIFIC OCEAN FISHERIES, PT	2161	POP - 07	6126	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelaku	Nama Pemilik	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Alasan Suspend
25	PP Suspend	INDOLAH FORTUNA, PT	8163	KENCANA MAD	3615	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
26	PP Suspend	BICHMIL JIMSON	7987	BALI REZIM - 1X	8563	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
27	PP Suspend	SUTOSO BERSALDARA, PT	3003	BU SATU RAYA	4075	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
28	PP Dulu	DESSY NATALIA	9100	TRI JAYA 8	4093	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
29	PP Dulu	DUA PUTRA PERKASA PRATAMA, PT	3180	DUA PUTRA PERKASA - 10	10049	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
30	PP Dulu	EDA	7101	CITRA NUSANTARA - 01	7723	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
31	PP Dulu	EDA	7101	CITRA NUSANTARA 8	8807	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
32	PP Dulu	JAYADALI BERSALDARA, PT	557	NUSANTARA - 188	1236	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
33	PP Dulu	JONHSON	1141	HAGI NELAYAN 1	10025	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
34	PP Dulu	KARYA SENTOSA SARAS, PT	3114	KOL KARYA MAHUR V3	1512	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
35	PP Dulu	NOVA SAPTA SARAS	1322	SWERIG RIZDI SARONAH	12026	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK
36	PP Dulu	SARUDERA MANDRE SELATAN, PT	821	KUPINA SANDO	3284	PNBP 0% atau +10%, SPT terakumulasi Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STBLAK

Perencanaan Susgand Kapas						
No	Pelabuhan	Nama Perseki	ID	Nama Kapal	Nomor Susg	Akuan Susgand
37	PP. Duku	CENTRAL BERKA UTAMA, PT	019	GARJAYA - 1883	2053	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
38	PP. Duku	CENTRAL BERKA UTAMA, PT	019	GARJAYA - 8	2070	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
39	PP. Duku-Duku	KOPERASI JASA PERHAKAM SETIA SUTU (PRT) KUDERAGI PTMAKAMAR KHALIPAH PUTRA MANDIRI	1113	IRMA MIRA 285	12711	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
40	PP. Duku-Duku	KUDERAGI PTMAKAMAR KHALIPAH PUTRA MANDIRI	1438	IRMA MIRA 284	12707	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
41	PP. Pambak (Bak)	PUTRA LEO NUSANTARA, PT	8881	PUTRA LEO KUNCOMO	8424	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
42	PP. Duku	KUM. BINTANG MARI	0329	MIRA MARIEM - 145	8108	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
43	PP. Kumpang	ACE FIAN (W) SAPUTRA	1132	PURTA JAYA 6	12459	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
44	PP. Kumpang	DEZEN SEPTIAN	0437	PURTA TUNGGA - 8	8176	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
45	PP. Kumpang	NOFY HEGAYAT	0933	LANCAR SUBUR - 3	7680	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
46	PP. Kumpang	NOULAH	8451	DUKA MELIA JI 2	2152	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
47	PP. Kumpang	LUN BUNGGOH	2021	SPN DEWI - 3	4900	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
48	PP. Kumpang	SENYI WILUKA	1948	SUNDES MANDIRI JAYA	10005	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK

Perencanaan Susgand Kapas						
No	Pelabuhan	Nama Perseki	ID	Nama Kapal	Nomor Susg	Akuan Susgand
49	PP. Kumpang	CHRISTINE	403	ADARVA SURABAYA - 1	3183	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
50	PP. Kumpang	DEVIN ANTONIO REWAN	1368	DUKA MELIA 88	11553	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
51	PP. Kumpang	HADI LAUT ANGLAHAN, PT	8138	ANGLOPAH - 83	7230	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
52	PP. Kumpang	HADI LAUT ANGLAHAN, PT	8139	MULIA JAYA - 3	7217	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
53	PP. Kumpang	MARHAN	891	ELLY WIJAYA - 8	8668	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
54	PP. Kumpang Lor	DARISMAN	1200	BOMBAY JAYA - 3	11396	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
55	PP. Kumpang Lor	DHARMOCLARA	1136	BUNGA ZETA WILAH	10680	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
56	PP. Kumpang Lor	UYAH ARRA	1367	SAFTIL BAPCHAH	10932	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
57	PP. Kumpang Lor	FALDI MUSTAMAN	1243	LILAH BAPCHAH	11088	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
58	PP. Kumpang Lor	GINAR GUNELAND	1207	GINAR MANDIRI	11041	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
59	PP. Kumpang Lor	IRAHYUDI	8407	PURTA SYAMAMA	11722	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
60	PP. Labuhan Lombok	SUTOSO BERKAUDARA, PT	3930	ERU TULUH	143	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
61	PP. Mueang	TUNAS BERKAUDARA, PT	2988	TUNAS BERKAUDARA - 01	8333	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
62	PP. Mueang	USN ADAS SIAH	4774	SAFITRA MELAYAN	8780	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK

Perencanaan Susgand Kapas						
No	Pelabuhan	Nama Perseki	ID	Nama Kapal	Nomor Susg	Akuan Susgand
63	PP. Mueang	LAURENSIA TRAZI	7005	NICO - 81	8071	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
64	PP. Mueang	LEI	878	KALIJARTIA 23	7480	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
65	PP. Mueang	MARION	88	WILDA JAYA BIRU - 1	1173	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
66	PP. Mueang	TU LAT	1229	APRI MELANI	334	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
67	PP. Mueang	LAM HOK	1384	ALIA REZKI	8304	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
68	PP. Mueang Arghe	AKBAR SUHARDI	8287	ELISSAS - 05	8388	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
69	PP. Mueang Arghe	ANG PERMAN	798	JAYA BAHARI	8433	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
70	PP. Mueang Arghe	BUDIMAN	1006	FAJAR SIKH	9905	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
71	PP. Mueang Arghe	BUDIMAN LAMARO JAYA	7922	HOLP TEMAN JAYA	8786	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
72	PP. Mueang Arghe	DEWY SUTAWATI S KOM	8431	USARA	8638	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
73	PP. Mueang Arghe	HELLEN HASILLA WILYA	7940	BINTANG JAYA BIRU	8214	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
74	PP. Mueang Arghe	HENDRY SUTISIA	8448	SOFTOM	8989	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
75	PP. Mueang Arghe	HENDRY SUTISIA	8448	MEKAR WILAYA NARASUR	8388	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK
76	PP. Mueang Arghe	HERMAN JURAN	7948	SIANG LAUT JAYA	8010	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STLAK

Pemeriksaan Suspond Kepar						
No	Perubahan	Nama Peserta	ID	Nama Ruang	Nilai RBP	Atasan Suspond
77	PP. Siswa Anglo	HERMAN ANAN	7503	LINGSUNG JAWA	10014	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
78	PP. Siswa Anglo	HERMAN ANAN	7503	KESALA	9402	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
79	PP. Siswa Anglo	HEWYAT SUTEJUA	183	ANOKA SAMUDRA	3400	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
80	PP. Siswa Anglo	HEWYAT SUTEJUA	183	MEKAR WUATA MANGUL - IV	3021	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
81	PP. Siswa Anglo	HEWYAT SUTEJUA	183	MEKAR WUATA MANGUL - VII	3006	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
82	PP. Siswa Anglo	HO LIE	7005	MIRA REJEN	9001	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
83	PP. Siswa Anglo	ITBENS	8075	SUMBER REJEN BETAWAN	8722	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
84	PP. Siswa Anglo	JIMMY SANTOSO	061	SAHTEPA ANJUNAN - 1	9008	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
85	PP. Siswa Anglo	JIMMY SANTOSO	061	SAHTEPA DEMANAN	1401	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
86	PP. Siswa Anglo	JOHN	225	ENTANO MAPS MANGUL	3024	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
87	PP. Siswa Anglo	MAYLINA S	1072	YAKSI BETAWAN	3001	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
88	PP. Siswa Anglo	NANI	8883	JAWA MANGUL	3011	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
89	PP. Siswa Anglo	ROBINSON	8075	PELANGI ANAK	1004	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK

Pemeriksaan Suspond Kepar						
No	Perubahan	Nama Peserta	ID	Nama Ruang	Nilai RBP	Atasan Suspond
90	PP. Siswa Anglo	RUDY SIMPOTI 4	1141	ARINA	7003	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
91	PP. Siswa Anglo	SACHIN TAJI	9433	ANOKA SAHARA - 02	3421	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
92	PP. Siswa Anglo	SNO TAJI TAJI	7225	SUMBER JAWA 08	9121	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
93	PP. Siswa Anglo	SURACH	306	SINAR SULAN	6006	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
94	PP. Siswa Anglo	TAN BENNY	1838	BERHAJI SANTOSA - 1	3007	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
95	PP. Siswa Anglo	TAN BENNY	1838	RENTANG JAWA PERKASA	3053	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
96	PP. Siswa Anglo	TAN ELEGANTO 0	1184	GUNA NUSANTARA JAWA	3070	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
97	PP. Siswa Anglo	TAJA SUTAJA	7581	MANAPAS INDAH PERKASA	9408	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
98	PP. Siswa Anglo	TAJA SUTAJA	7581	SAMUDRA PASIRI	6006	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
99	PP. Siswa Anglo	VEGEN YANESYA	9191	KAUTAN 2	3005	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
100	PP. Siswa Anglo	WILLY	8028	CENDANA	8003	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
101	PP. Siswa Anglo	WILLY	8047	KEM. WINGZ 02	3013	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
102	PP. Siswa Anglo	WIPAKUS	2000	SUMBER ANAK	300	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK

Pemeriksaan Suspond Kepar						
No	Perubahan	Nama Peserta	ID	Nama Ruang	Nilai RBP	Atasan Suspond
103	PP. Nizam Zachran Jakarta				3436	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
104	PP. Nizam Zachran Jakarta					
105	PP. Nizam Zachran Jakarta	ARITA ANNA JAWA, PT	606	ARITA ANNA JAWA - 8	2003	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
106	PP. Nizam Zachran Jakarta	DARRIN 0	1234	JAWA SAHARA 02	8347	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
107	PP. Nizam Zachran Jakarta	DARRIN 0	1234	KALIMANTAN JAWA 1	5401	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
108	PP. Nizam Zachran Jakarta	DARRIN 0	1234	SAMPURNA JATI MANGUL	8346	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
109	PP. Nizam Zachran Jakarta	EDMANTO 0	1247	SUMBER MAJU	3008	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
110	PP. Nizam Zachran Jakarta	FANRIZKI RIZKI	7341	KAMI JAWA - 8	8013	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
111	PP. Nizam Zachran Jakarta	GRANA INDAH SELANTERA, PT	8807	MITRA PRIMA - 8	8801	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK
112	PP. Nizam Zachran Jakarta	GRANA INDAH SELANTERA, PT	8807	MITRA PRIMA 18	8001	PNBP 0% atau +10%, SPP terbit Jan s.d. Maret, sudah ada SPB/STELAK

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelabuhan	Nama Persepsi	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Akses Suspend
113	PP. Niaran Zachran Jakarta	INDALAM JAYA, PT	5245	LELAT KARMATA	6390	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
114	PP. Niaran Zachran Jakarta	HARUN	1192	BEDAR	6227	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
115	PP. Niaran Zachran Jakarta	HARYONO	6675	BAHANA CINA - 33	6090	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
116	PP. Niaran Zachran Jakarta	RHE FOK BEL	1343	DAHAYA ALAM - 41	7994	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
117	PP. Niaran Zachran Jakarta	KLANG DIN SUBSER	1654	GALVIN	2417	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
118	PP. Niaran Zachran Jakarta	SAKALUR, PT	6243	ASSA FOMPEYE - 52	6470	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
119	PP. Niaran Zachran Jakarta	SIKUNTANA, PT	6104	APRORINA - 5	6956	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
120	PP. Niaran Zachran Jakarta	KAFKI NUNDAWI	2824	SURYA JAYA - 1	6714	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
121	PP. Niaran Zachran Jakarta	RAYMOND	667	SAMBUNG BAHAR	6620	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
122	PP. Niaran Zachran Jakarta	SUBSER SAMUDRA SEJATI, PT	9651	UNITED SUBSER 2	12316	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelabuhan	Nama Persepsi	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Akses Suspend
123	PP. Niaran Zachran Jakarta	TONI	1247	DMAR KOLUNING	3742	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
124	PP. Niaran Zachran Jakarta	UNIVERSAL SAMUDRA SUKSES, PT	6067	SAMUDRA UNITED 1	11361	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
125	PP. Niaran Zachran Jakarta	WINARTO WAWYUDI	671	MULTI SARANA PERSAT - 2	3146	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
126	PP. Niaran Zachran Jakarta	YULIANTO	6019	NIYAH - 2	9650	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
127	PP. Pelabuhan	BINTANG HANAPAN JAYA, PT	6077	KAPTERA HADEL - 11	4816	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
128	PP. Pelabuhan	BINTANG HANAPAN JAYA, PT	6077	PUTRA SUKSES MANDIRI 2	12304	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
129	PP. Pelabuhan	SKO AGUS TONO	6145	KANG JAYA	6140	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
130	PP. Pelabuhan	ERA BAWANG JAYA, PT	1152	JASA MIRA SPRAWIT	10363	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
131	PP. Pelabuhan	PERKY KURNIAWAN	6666	NIYAH JAYA BAWANG	364	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
132	PP. Pelabuhan	JOKO SUPRIYANTO	1174	SUBSER HARAPAN	11128	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
133	PP. Pelabuhan	KURNIA ALAM RAYA, PT	5143	KURNIA ALAM	2190	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
134	PP. Pelabuhan	LAZLA HIDAYAT	633	MEYAH ADABI - 2	3139	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK

Perusahaan Suspend Kapital						
No	Pelabuhan	Nama Persepsi	ID	Nama Kapal	Nomor BHP	Akses Suspend
135	PP. Pelabuhan	RUDI TOPK SETYADI	6027	HANA RTS	16127	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
136	PP. Pelabuhan	RUDI HARIANTO	6953	DPS MULYA	3452	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
137	PP. Pelabuhan	SHAR AFRIKI SHERITA, PT	4846	BINTANG AFANDI - 2	4501	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
138	PP. Pelabuhan	SURYA MIRA SUGHTERA, PT	5164	BINTANG SURYA BERGEMAY	12675	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
139	PP. Perangal	MANGUR JAYA PERANGAL, PT	6313	MARTAPURA	1384	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
140	PP. Perangal	NETAJARI OKTAVIANA RUFASRI	1303	ADM PUTRA	11195	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
141	PP. Perangal	RUFASRI	1380	BRICKAH ANAK MAS - 07	11696	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
142	PP. Perangal	USAMA JAYA PUTRA SUNDJOTO, PT	5086	USAMA JAYA	1903	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
143	PP. Perangal	USAMA JAYA PUTRA SUNDJOTO, PT	5086	USAMA JAYA - V	1076	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
144	PP. Persepsi	BINTANG HANAPAN JAYA, PT	6077	PUTRA SUKSES MANDIRI 2	12373	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
145	PP. Persepsi	ALLAN KRISTANTO	7655	SAMPAH MIRA BIRIKAH - 01	6679	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK
146	PP. Persepsi	ANDHAN HADI	2652	PESU	6355	PHSP 0% atau +10%, DFI terak Jan 6-8 Maret, setelah ada SPB/STBLAK

Pemeriksaan Suspensi Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perahli	ID	Nama Kapal	Nomor BAP	Alasan Suspensi
147	PP. Pasmater	LELITANTJATI	1395	DEGAR TANG - 2	6366	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
148	PP. Pasmater	SEWA SAMUDRA GEMILANG, PT	1427	MDD 06	12720	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
149	PP. Pasmater	MUHAMMAD EFFENDY	4925	KANDY 01	11236	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
150	PP. Pasmater	SAMUDRA DELAPAN INDAH, PT	4631	SAMUDRA DELAPAN INDAH, PT	11064	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
151	PP. Pasmater	TOTOK DARMAWANTO	1457	PERMATA NYA SARANG 04	12648	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
152	PP. Pasmater	YASITO	1373	SHAKET	2640	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
153	PP. Pasmater	H. RIDWAN EFFENDY	344	SLAMBO MUTIARA	285	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
154	PP. Pasmater	SUTYEM	1076	CAMATA PUTRA PERKASA	11919	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
155	PP. Sumbah	KOZE HANDAYAN	4947	NYA SARANG 147	12184	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
156	PP. Sumbah	VYUW HENDY PUSPA	1237	DEKANG MAS MELDA	12367	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
157	PP. Sumbah	ANGGIRAH SAMUDERA HINDA, PT	4406	JALA JAYA - 4	741	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
158	PP. Sumbah	ANGGIRAH SAMUDERA HINDA, PT	4406	LAUT SUDUR - 9	3296	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK

Pemeriksaan Suspensi Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perahli	ID	Nama Kapal	Nomor BAP	Alasan Suspensi
159	PP. Sumbah	ANGGIRAH SAMUDERA HINDA, PT	4406	DEKANG LAUT	4274	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
160	PP. Sumbah	BETTULO	1330	TERATAU - 3	770	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
161	PP. Sumbah	CANAYA PUTRA HENDEY, PT	1108	HARAPAN KENNEDY	8313	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
162	PP. Sumbah	DEVI KENANGA	5004	NUSANTARA INDAH - 04	3673	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
163	PP. Sumbah	HARAPAN SARI LAUT, PT	3491	BERAS BERGAMA	6387	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
164	PP. Sumbah	HADI LAUT ANJUNAN, PT	5136	HIDAYAT JATI	8862	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
165	PP. Sumbah	HENDRI MURNAS	5617	SELAMAT JADI - 01	7614	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
166	PP. Sumbah	HENLY	3477	CARILANG	12097	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
167	PP. Sumbah	JUNEDI	3473	BURVA JAYA	4213	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
168	PP. Sumbah	KUB. REZERVA LAUT 1	4940	NYA NYA 810	7237	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
169	PP. Sumbah	LINA	8024	WALYA	4785	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
170	PP. Sumbah	OEI SU HONG	2821	KARTYA TOUNGOLN 06	6280	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK

Pemeriksaan Suspensi Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perahli	ID	Nama Kapal	Nomor BAP	Alasan Suspensi
171	PP. Sumbah	RONALD NUSA 0	973	CENTRAL INE 0	3624	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
172	PP. Sumbah	SAJANG	575	HARI BAK REZERVA	6154	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
173	PP. Sumbah	SUMARTO	1665	EMAK ANEKA	5153	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
174	PP. Sumbah	AHMAD MUNDAGOW	1604	AGTAG - 11	3197	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
175	PP. Sumbah	HERRY YUENI VADIS SUNDANA	1121	AGTAG - 15	788	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
176	PP. Sumbah	JONNY E. SAHMPA KRISNO	2678	AGTAG - 6	6225	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
177	PP. Sumbah	KRESNO PONTON	482	CINTA BAHARI - 4	2796	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
178	PP. Sumbah	SARAH MELZAR TULENDE	1321	CINTA BAHARI 8	1583	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
179	PP. Sumbah	ZOTLY R. HANIKOMAN	1730	CINTA BAHARI - 10	1530	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
180	PP. Sumbah	HERRY KUNSAN	5155	HARI SAMUDRA - 04	6695	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
181	PP. Sumbah	HERRY KUNSAN	5155	HARAPAN JAYA - 0	6647	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
182	PP. Sumbah	HERRY KUNSAN	5155	JEMBAR SAMUDRA	6650	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
183	PP. Sumbah	HERRY KUNSAN	5155	SARANG PERDANA - 11	6648	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK
184	PP. Sumbah	JANISDON	5151	PERDANA KARTHA MANDIRI	7042	PNBP 0% atau +10%, SPT terak Jan s.d. Maret, sesuai ada SPB-STBLAK

Perencanaan Suspond Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perakib	ID	Nama Kapal	Nomor SARP	Alasan Suspond
183	PP. Sungai Rengas	AARUDDIN	8101	BINTANG PERMATA	8819	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
184	DP. Sungai Rengas	AARUDDIN	8101	SIAM BAHAGIA	7136	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
187	DP. Sungai Rengas	JAYABALI BERKAUDARA, PT	537	CHARLY UNION UTAMA	1077	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
188	DP. Sungai Rengas	JOVI	8701	NETAPANG JAYA - 1	9603	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
189	DP. Sungai Rengas	JOVI	8701	MARINA JAYA - 17	9599	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
190	DP. Sungai Rengas	JOVI	8701	MARINA JAYA - 19	12787	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
191	DP. Sungai Rengas	KEDI	7362	A.R PUTRA	11605	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
192	DP. Sungai Rengas	LEONY YOLANA	7175	BINTANG KATULISTIKAWA	8740	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
193	DP. Sungai Rengas	NGABING HENDRA NG	753	BINTANG TENGGAH	7077	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
194	DP. Sungai Rengas	SUSANTI	1107	CAHAYA MANJARI - 8	8963	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
195	DP. Sungai Rengas	SUSANTI	1107	CAHAYA MEGAR	8074	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
196	DP. Sungai Rengas	USMAN SAHON	1210	WIRA SAMUDERA A	11187	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
197	PP. Sungai/ Batas Arah	SETI RATMAHWATI	1194	SLEBBER BERDAH - 1	11605	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
198	PP. Tanjung Batu Arah	AGUSTANADI	8201	BELAKKAN JAYA	9061	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK

Perencanaan Suspond Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perakib	ID	Nama Kapal	Nomor SARP	Alasan Suspond
199	PP. Tanjung Batu Arah	TONEI HARICHO	660	REZZO BARU	5237	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
200	PP. Tanjung Batu Arah	TONGKOP HANDE	615	ANGGIRANI - 0	734	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
204	DP. Tanjung Batu Arah	TONGKOP HANDE	615	KUMAHARI	2647	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
202	PP. Teupah	AGUSTIN	1185	LEBI JAYA	11806	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
203	PP. Teupah	AHMAD FAZEL	1183	PUPUS PURBA SARI	11266	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
204	PP. Teupah	AVEN WIJAYA	7015	BLANG BANG	11802	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
205	PP. Teupah	CECEP BUSILO	1074	MEKAR JAYA VII	11877	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
206	PP. Teupah	H. GUMARSO	517	PAJAN MULYA	121	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
207	PP. Teupah	HENDRI GUNAWAN	6706	DEWANTANA SUPRA	12647	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
208	PP. Teupah	HENDRI GUNAWAN	6706	MEGAPURA MUDA	12162	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
209	PP. Teupah	MOMI APRIL SE	6207	TADVA - 00	8787	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
210	PP. Teupah	RABEN	1267	REMA JAYA I	11402	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
211	PP. Teupah	SARUDERA RADITRI SANDRI, PT	5096	SUBUR MANJARI	8096	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
212	PP. Teupah	SANTI WICHIATI	1015	MEGA PERKASA	11075	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
213	DP. Teupah	YOTIS	1096	MA JAYA BARI	6992	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK

Perencanaan Suspond Kapal						
No	Pelabuhan	Nama Perakib	ID	Nama Kapal	Nomor SARP	Alasan Suspond
214	PP. Teupah	WAFIUDIN	1102	BETHUGI SARI LANCAR - 1	11250	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
215	DP. Teupah	WANTORO	1168	PUTRA MERDEKA	11872	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
216	PP. Teupah	WANUGA	1290	SAMPUDERA LISTARI	11790	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
217	DP. Teupah	YUSUF ANIF	1308	TERGAULUNG	11882	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
218	PP. Tobo	JANI SYAMBU ALAM	1388	NAPISAH 03	10180	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
219	PP. Tobo	KUD TUNAS TERBIT	2148	IBKA BINA - 780	9639	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
220	PP. Ulu	DIKOR	1400	YAKIN REZKI BERHAMA	12840	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
221	Pu. Berca	BINTANG JAYAWITA SANDRI, PT	8303	NUSANTARA JAYA 31	10642	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
222	Pu. Berca	HADONO	2325	GINAR MAG 99	8815	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
223	Pu. Berca	PURNAS SURYA, PT	632	MUTIARA - 1	7867	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
224	Pu. Berca	PURNAS SURYA, PT	632	TUNAS JAYA - 1	7868	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK
225	Pu. Berca	SUMBER MIRA SARUDERA, PT	8301	BETA JAYA 0	8283	PNBP 0% atau < 10%, SPT beres Jan s.d Maret, sudah ada SPB/STELAK

Kepala Perencanaan dan Analisis Perencanaan

Lampiran 6. Memorandum
 Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

- h. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 9. Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)

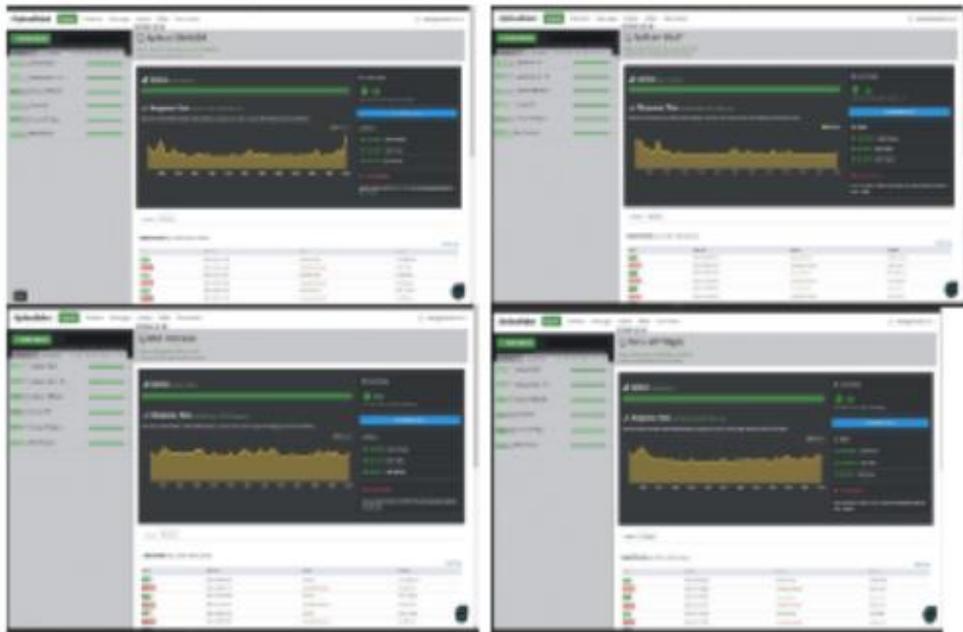
Profil Risiko	Jumlah Pelaku Usaha	Persentase
Rendah	3.218	71%
Rendah Sekali	600	13%
Sedang	665	15%
Tinggi	60	1%
Grand Total	4.541	

Profil Risiko Rendah (Rendah Sekali dan Rendah) 84%

INDIKATOR PENGUKURAN PROFIL RISIKO			Skor Perilaku				
No	Indikator	Skor Perilaku	1	2	3	4	5
1	Raport Iku saat berdayakan akan akan selalu laporan pengangkap smpf dalam satuan Gross Tonnage (GT)	Kepemilikan wali dalam satuan GT dibebaskan berdasarkan skuan dari GT laporan yang dimiliki oleh pelaku usaha	<100 GT	100-200 GT	200-300 GT	300-1.000 GT	>1000-20.000 GT
2	Keputusan untuk pembayaran kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan	Luas waktu pembayaran kewajiban pungutan hasil perikanan yang dibayar sejak tanggal STBKK	<3 hari	1-5 hari	5-7 hari	7-30 hari	>30 hari
3	Peraturan perikanan pengalangan hasil yang tepat dan akurat	Nilai PMP dibayar rata-rata berdasarkan perdagangan dengan profil perilaku yang sesuai	Lebih besar dari 50% M/s Beras PMP	75-90% dari 50% M/s Beras PMP	50-75% dari 50% M/s Beras PMP	25-50% dari 50% M/s Beras PMP	kurang dari 25% dari 50% M/s Beras

- i. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 10. Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan





- j. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 11. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)





- k. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 12. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

JUMLAH SUB DAERAH TERBES PER PROVINSI (SERKAD)		
NO	PROVINSI	JML. SUB DAERAH
1	PROVINSI ACEH	802
2	PROVINSI BALI	46
3	PROVINSI BANJIR	80
4	PROVINSI BANGKALU	5
5	PROVINSI DI. YOGYAKARTA	4
6	PROVINSI DKI JAKARTA	702
7	PROVINSI GORONTALO	122
8	PROVINSI GAMB	7
9	PROVINSI JAWA BARAT	622
10	PROVINSI JAWA TENGAH	1246
11	PROVINSI JAWA TIMUR	390
12	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	103
13	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	234
14	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	156
15	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	128
16	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	332
17	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	104
18	PROVINSI LAMPUNG	184
19	PROVINSI MALUKU	308
20	PROVINSI MALUKU UTARA	113
21	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	310
22	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	22
23	PROVINSI PAPUA	67
24	PROVINSI PAPUA BARAT	626
25	PROVINSI PAPUA SELATAN	114
26	PROVINSI PAPUA TENGAH	4
27	PROVINSI RIAU	212
28	PROVINSI SULAWESI BARAT	253
29	PROVINSI SULAWESI TENGAH	289
30	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	176
31	PROVINSI SULAWESI UTARA	653
32	PROVINSI SUMATERA BARAT	420
33	PROVINSI SUMATERA SELATAN	50
34	PROVINSI SUMATERA UTARA	232
35	PROVINSI SULAWESI SELATAN	2509
GRAND TOTAL		12869

Lampiran 7. Memorandum

Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

- l. SK3 Korporasi nelayan yang dikembangkan, IKU 13. Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah koperasi)

2339.QDD.004 – KUB yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)

TARGET
5
Kelompok

REALISASI
5
Kelompok

Keterangan

Penguatan kelembagaan terdiri dari:

1. Mengukur/verifikasi kesiapan ke program penguatan korporasi berbasis CBM
2. Tenaga Pendamping Masyarakat
3. Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi

Lokasi	Nama Koperasi	Kegiatan
Banuwangi	Koperasi Mera Bekah Lanteh	1. Identifikasi 2. Penguatan Model Bisnis 3. Penguatan proposal 4. Penguatan kelembagaan
Sulawesi	Koperasi Sembel Bayat Majo	1. Identifikasi 2. Penguatan Model Bisnis 3. Penguatan proposal 4. Penguatan kelembagaan
Sembel Lempung	Koperasi Nelayan Kelajo Pulau Pasoran	1. Identifikasi 2. Penguatan Model Bisnis 3. Penguatan proposal 4. Penguatan kelembagaan
Sulawesi	Koperasi Nelayan Semata Pabbahu	1. Identifikasi 2. Penguatan Model Bisnis 3. Penguatan proposal 4. Penguatan kelembagaan
Sula Esiang	Koperasi Diting Laut Sejahtera	1. Identifikasi 2. Penguatan Model Bisnis 3. Penguatan proposal 4. Penguatan kelembagaan

- m. SK4 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK , IKU 14. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan

TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIT - PERIZINAN DAN KENELAYANAN		
NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERLIBAT
1	KALAJU	2617
2	SEHAT	10212
3	DIVERSIFIKASI	2090
4	PENDANAAN	1740
6	KUR	4141
8	BAKNEL	109000
9	ASNELMAN	5571
10	KUSLUKA	117049
11		
	TOTAL	252948

Lampiran 8. Memorandum
 Nomor : 55/DJPT.5/RC.610/I/2024
 Tanggal : 15 Januari 2024

- n. SK5 Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan IKU 15 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)

No	Indikator	Jumlah Pegawai yang Berprestasi	Kualitas Kerja (K)		Kuantitas Kerja (Q)		Kedisiplinan Kerja (D)		Kemampuan Kerja (C)		Tingkat Ketercapaian (%)	Berkas
			P	Prestasi	P	Prestasi	P	Keabsahan	P	Keabsahan		
1	KEHENDAK SIARAN/KEHENDAK SIARAN	0	32	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0%	0/0
2	KEHENDAK SIARAN/KEHENDAK SIARAN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0/0
3	KEHENDAK SIARAN/KEHENDAK SIARAN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0/0
4	KEHENDAK SIARAN/KEHENDAK SIARAN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0/0
5	KEHENDAK SIARAN/KEHENDAK SIARAN	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0/0

- o. SK5 Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan IKU 16 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

No	Indikator	Nilai	Target	Persentase	Kategori	Catatan

1. Pada tahun 2023, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan telah melaksanakan 11 indikator kinerja yang terdapat dalam 3 indikator Sub-Indikator, dan 1 indikator Sub-Indikator, dan 1 indikator Sub-Indikator.

2. Aspek Rekonsiliasi Kinerja, dan Ketercapaian telah efektif dan menghasilkan nilai 100%.

Pembina: (Andi Tjahjono, S.T.)

Wakil yang di Bantu: (Mansur)

